



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt.2
Telp/Fax. (022) 6631725, Website : disdik.cimahikota.go.id e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0481 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan /atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :**
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AMIR MACHMUD** Nomor : 02/PAUD/AMIR Tanggal 04 Februari 2019;
 2. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 12 Februari 2019 tentang persyaratan **PAUD AMIR MACHMUD** dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Cibeber Nomor : 503/163/Kel.Cibeber/2018;
 4. Keputusan **Kepala Dinas** tentang izin penerimaan peserta didik baru lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 421.9/Kep.5202-DISDIK/2018;
 5. Surat perjanjian perizinan penempatan bangunan untuk dipakai sebagai pendidikan PAUD nomor : 01/PAUD/AMIR.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : **PAUD AMIR MACHMUD**
Alamat : Jl. Ibu Sangki RT 03 RW 13
Kel.Cibeber Kec.Cimahi Selatan
Kota Cimahi
NPSN : -
Nomor Telepon : 082217214005
Jenis Layanan : PAUD
Kepala Sekolah : **ZUBAEDAH KARMILA**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai **bulan Februari Tahun 2019** dan berakhir sampai dengan **bulan Januari Tahun 2022**

KETIGA

- Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2019

